



ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAKYAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN

Ririn Rindriyani Durrotun Nisa

Univesitas Sultan Ageng Tirtayasa

Laeli Nur Khanifah

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Salma Zulayka

Univesitas Sultan Ageng Tirtayasa

Aziza Nawra Pasya

Univesitas Sultan Ageng Tirtayasa

Ananda Khansa Sayidina

Univesitas Sultan Ageng Tirtayasa

Ananda Chanaya Meutya Lestari

Univesitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Palka KM. 3 Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang, Prov. Banten

Korespondensi penulis: 6670230121@untirta.ac.id

***Abstract** The Sekolah Rakyat Program is a government initiative aimed at improving educational access for poor and extremely poor communities while supporting equitable regional development. This study aims to analyze the implementation of the Sekolah Rakyat Program within the regional development planning framework of Banten Province using George C. Edwards III's policy implementation perspective. The research employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observation, documentation, and literature review, and were analyzed through data reduction, presentation, and interpretation. The findings indicate that the program implementation is supported by relatively effective communication, adequate resources, positive implementer disposition, and a well-coordinated bureaucratic structure. However, several challenges remain, including limited land availability, complex inter-agency coordination, disparities in regional capacity, and resistance from some community members toward the boarding school system.*

Keywords: educational access; policy implementation; regional development; Sekolah Rakyat

Abstrak Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem sekaligus mendukung pemerataan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Sekolah Rakyat dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Banten menggunakan perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi literatur, kemudian dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Sekolah Rakyat didukung oleh komunikasi yang relatif efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, disposisi pelaksana yang positif, serta struktur birokrasi yang terkoordinasi. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan lahan, kompleksitas koordinasi antar lembaga, perbedaan kapasitas daerah, dan resistensi sebagian masyarakat terhadap sistem pendidikan berasrama.

Kata Kunci: akses pendidikan; implementasi kebijakan; pembangunan daerah; sekolah rakyat

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sektor strategis dalam pembangunan daerah karena berperan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) (Sulfiani et al.,

2025). Dalam perspektif pembangunan, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, keterampilan, dan kapasitas individu agar mampu berpartisipasi secara produktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik (Suryana, 2020). Daerah yang memiliki tingkat pendidikan yang baik cenderung lebih mampu menciptakan masyarakat yang inovatif, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki daya saing yang tinggi. Oleh karena itu, investasi di bidang pendidikan menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan.

Selain itu, pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan pemerataan pembangunan. Melalui akses pendidikan yang merata dan inklusif, masyarakat dari berbagai latar belakang dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini sangat relevan dalam konteks pembangunan daerah, di mana seringkali terdapat ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan atau antara kelompok sosial tertentu. Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang tepat dapat menjadi instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dan memperkuat kohesi masyarakat.

Masih adanya kesenjangan akses pendidikan di Provinsi Banten menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Kesenjangan ini terlihat dari perbedaan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak antara wilayah perkotaan dan pinggiran, serta antara kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang berbeda (Fitriyani et al., 2025). Sebagian masyarakat, khususnya dari keluarga berpenghasilan rendah, masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan biaya pendidikan, kurangnya fasilitas pendukung, serta akses transportasi yang tidak memadai menuju sekolah. Selain itu, distribusi sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata juga menyebabkan kualitas layanan pendidikan tidak sama di setiap wilayah (Nelliraharti & Jarmita, 2025).

Di sisi lain, faktor non-ekonomi seperti rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, keterbatasan informasi, serta kondisi sosial budaya juga turut memperlemah akses masyarakat terhadap pendidikan. Hal ini berdampak pada masih adanya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan atau mengalami putus sekolah. Kesenjangan ini tidak hanya berpengaruh pada individu, tetapi juga berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia di Provinsi Banten secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang tepat dan terintegrasi untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Munculnya Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusivitas pendidikan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan pendidikan formal. Program ini dirancang untuk menjangkau masyarakat marginal, seperti keluarga berpenghasilan rendah, anak putus sekolah, maupun mereka yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan fasilitas pendidikan. Melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif, Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga memberikan keterampilan dasar dan pemberdayaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat (Sari et al., 2025)

Dalam hal pembangunan daerah, Program Sekolah Rakyat menjadi instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara lebih merata. Program ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial di bidang pendidikan, dengan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Selain itu, keberadaan program ini

dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena pendidikan yang inklusif akan mendorong lahirnya individu yang lebih mandiri, produktif, dan mampu berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya (Siswana, 2026).

Pentingnya integrasi program pendidikan dalam perencanaan pembangunan daerah terletak pada peran strategis pendidikan sebagai fondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia (Suharti & Haifaturrahmah, 2025). Pendidikan tidak dapat berdiri sendiri sebagai sektor yang terpisah, melainkan harus terhubung dengan berbagai sektor lain seperti ekonomi, sosial, dan ketenagakerjaan agar mampu memberikan dampak yang optimal. Ketika program pendidikan terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD atau RKPDP, maka arah kebijakan menjadi lebih terarah, terukur, dan selaras dengan kebutuhan serta potensi daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang program yang tidak hanya meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan pembangunan ekonomi lokal.

Selain itu, integrasi ini juga penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program. Tanpa adanya integrasi, program pendidikan berpotensi berjalan secara parsial dan tidak sinkron dengan kebijakan lainnya, sehingga hasilnya kurang maksimal. Dengan adanya koordinasi antar perangkat daerah, program pendidikan dapat didukung oleh sektor lain, seperti infrastruktur, transportasi, dan kesejahteraan sosial, yang pada akhirnya memperkuat keberhasilan implementasinya (Samhaji & Anggara, 2025). Integrasi dalam perencanaan pembangunan daerah juga memungkinkan adanya pengawasan dan evaluasi yang lebih sistematis, sehingga program pendidikan dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi program pendidikan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sulfiani et al., 2025).

Permasalahan implementasi program pendidikan, termasuk Program Sekolah Rakyat, dapat dilihat dari aspek efektivitas program, koordinasi antar aktor, serta capaian kebijakan. Dalam pelaksanaannya, program seringkali belum mampu mencapai tujuan secara optimal akibat keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum meratanya kualitas pelaksanaan program di lapangan (Saputri & Fatmawati, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan program, tetapi juga oleh proses implementasi yang melibatkan berbagai aktor dan mekanisme pelaksanaan kebijakan.

Keberhasilan implementasi tidak hanya diukur dari output, tetapi juga dari dampak jangka panjang yang dihasilkan. Oleh karena itu, analisis implementasi diperlukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan yang dirancang (*policy design*) dengan realitas pelaksanaannya (*policy implementation*), sehingga dapat diketahui apakah program tersebut efektif, efisien, dan tepat sasaran (Widjaja & Dhanudibroto, 2025). Program seringkali tidak berjalan optimal karena adanya hambatan struktural maupun kultural yang tidak terdeteksi sejak awal. Dengan melakukan analisis yang komprehensif, pemerintah dapat memahami akar permasalahan secara lebih mendalam, sehingga mampu merumuskan strategi perbaikan yang lebih tepat dan berbasis bukti (*evidence-based policy*) (Ni'mah et al., 2025).

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Sekolah Rakyat di Provinsi Banten dalam meningkatkan akses pendidikan masyarakat menggunakan perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan

program serta mengkaji relevansinya terhadap perencanaan pembangunan daerah di sektor pendidikan.

KAJIAN TEORI

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik. Dalam konteks pembangunan daerah, kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan pembangunan, termasuk dalam sektor pendidikan. Program Sekolah Rakyat dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan publik yang dirancang untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan, khususnya bagi kelompok masyarakat marginal. Namun, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. (Edwards III, 1980) Menurut George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu: komunikasi (*communication*), sumber daya (*Resources*), disposisi (*Disposition/Attitude*), dan struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*). Aspek komunikasi berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi penyampaian kebijakan kepada pelaksana maupun kelompok sasaran. Sementara itu, sumber daya mencakup ketersediaan tenaga pelaksana, anggaran, serta sarana dan prasarana yang mendukung program. Disposisi merujuk pada komitmen dan sikap pelaksana terhadap kebijakan, sedangkan struktur birokrasi menjadi faktor penting dalam menentukan kelancaran implementasi melalui kejelasan prosedur, koordinasi antar lembaga, serta pembagian tugas dan kewenangan yang terorganisasi secara efektif (Edwards III, 1980).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk menganalisis implementasi Program Sekolah Rakyat di Provinsi Banten dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai proses implementasi kebijakan, interaksi antar aktor, serta berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program di lapangan (Creswell, 2015). Studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi Program Sekolah Rakyat sebagai suatu bounded system yang memiliki karakteristik kontekstual dan melibatkan berbagai aktor kelembagaan dalam pelaksanaannya.

Fokus penelitian diarahkan pada implementasi Program Sekolah Rakyat, khususnya terkait proses perencanaan program, koordinasi antar lembaga, kesiapan sumber daya, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program dalam mendukung pemerataan akses pendidikan masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi literatur terhadap berbagai dokumen kebijakan serta penelitian terdahulu yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui proses pengorganisasian, reduksi, penyajian, dan interpretasi data secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan penelitian (Creswell, 2015).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinamika Komunikasi Kebijakan dalam Implementasi Program Sekolah Rakyat

Dinamika komunikasi kebijakan dalam implementasi Program Sekolah Rakyat (SR) menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas dan anggaran, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaksana lapangan, dan masyarakat sasaran (Ibnu & Kurniawan, 2025). Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai kebijakan pendidikan inklusif yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem (desil 1 dan desil 2) dengan model *boarding school* penuh yang seluruh kebutuhan siswanya ditanggung oleh negara (Juhaeriah, 2025). Dalam pelaksanaannya, komunikasi menjadi instrumen utama untuk menyampaikan tujuan program, mekanisme penerimaan peserta didik, pembagian kewenangan antarinstansi, hingga proses pendampingan keluarga penerima manfaat.

Komunikasi kebijakan terlihat sejak tahap awal pendataan dan penjangkauan peserta. Pemerintah menggunakan data rumah tangga miskin sebagai dasar identifikasi sasaran, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan home visit yang dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) atau petugas sosial (Fajri, 2022). Melalui proses ini, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme verifikasi kondisi sosial ekonomi keluarga serta upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap program. Interaksi langsung antara petugas dan keluarga menjadi penting karena banyak calon peserta yang berasal dari kelompok rentan yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan formal.

Selain komunikasi dengan masyarakat, implementasi Sekolah Rakyat juga membutuhkan koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peran dalam menyiapkan lahan, menetapkan peserta didik, serta menugaskan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kondisi ini menciptakan pola komunikasi kebijakan yang bersifat vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, kebijakan dan arahan berasal dari pemerintah pusat menuju pemerintah daerah dan pelaksana lapangan (Purnomo, 2018). Sementara secara horizontal, koordinasi dilakukan antarinstansi yang terlibat, seperti Kemensos, pemerintah daerah, pendamping sosial, serta lembaga pengawasan. Kompleksitas hubungan tersebut menuntut adanya kesamaan pemahaman agar tidak terjadi perbedaan interpretasi terhadap tujuan dan prosedur program.

Dinamika komunikasi dalam implementasi Sekolah Rakyat juga menghadapi berbagai tantangan. Penelitian mengenai implementasi Program Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa komunikasi lintas sektor masih berpotensi mengalami distorsi makna dan perbedaan pemahaman di tingkat pelaksana. Kompleksitas koordinasi antar kementerian dan lembaga menyebabkan perlunya mekanisme komunikasi yang lebih terintegrasi agar informasi yang disampaikan tetap konsisten (Cahyono, 2026). Apabila terjadi ketidaksesuaian informasi, maka pelaksanaan program dapat mengalami hambatan, baik dalam proses rekrutmen peserta, penyediaan fasilitas, maupun pelaksanaan layanan pendidikan dan sosial yang menjadi karakter utama Sekolah Rakyat (Hariyanto et al., 2026).

Dinamika komunikasi juga terlihat dalam upaya mengatasi resistensi dari sebagian keluarga dan calon peserta. Beberapa keluarga menolak mengikuti program karena anak telah terbiasa bekerja di jalan, membantu ekonomi keluarga, atau merasa tidak nyaman dengan sistem asrama. Oleh karena itu, komunikasi persuasif menjadi strategi penting untuk menjelaskan manfaat jangka panjang pendidikan, jaminan kebutuhan hidup selama sekolah, serta peluang

peningkatan kualitas hidup bagi peserta (Inayah, 2023). Dalam konteks ini, komunikasi kebijakan tidak hanya berfungsi menyampaikan aturan, tetapi juga menjadi sarana membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah.

Dinamika komunikasi kebijakan dalam implementasi Program Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa komunikasi merupakan fondasi utama dalam memastikan kebijakan dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang efektif di lapangan. Keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaksana lapangan, dan masyarakat penerima manfaat. Dengan komunikasi yang jelas, konsisten, dan partisipatif, tujuan utama Sekolah Rakyat untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok miskin dapat lebih mudah tercapai.

Kesiapan Sumber Daya dalam Mendukung Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat

Ketersediaan sumber daya merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi Program Sekolah Rakyat. Perspektif implementasi kebijakan menjelaskan bahwa, sumber daya mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan pendanaan dan waktu pelaksanaan yang memadai untuk memastikan program dapat berjalan secara efektif. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, tujuan kebijakan akan sulit diwujudkan secara optimal (Edwards III, 1980). Dari aspek sumber daya manusia, Program Sekolah Rakyat memerlukan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten untuk mendukung proses pembelajaran dan pembinaan peserta didik.

Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang mampu memahami karakteristik peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan rentan. Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik menjadi salah satu indikator kesiapan sumber daya yang menentukan keberhasilan program (Mulyasa, 2021). Pemerintah daerah memiliki peran dalam menugaskan Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), untuk mengisi kebutuhan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta wali asrama apabila diperlukan. Meskipun ketersediaan calon tenaga pendidik dinilai cukup, proses penyesuaian kompetensi dan evaluasi kinerja tetap diperlukan agar penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Program Sekolah Rakyat.

Kesiapan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam menunjang pelaksanaan program. Fasilitas pendidikan yang memadai berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung proses pendidikan secara berkelanjutan. Sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang kelas, asrama, perpustakaan, fasilitas teknologi informasi, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pengelolaan fasilitas pendidikan harus dilakukan secara optimal agar mampu mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara efektif (Rajagukguk et al., 2023).

Pemerintah menetapkan standar yang cukup ketat terkait penyediaan lahan dan fasilitas Sekolah Rakyat. Lahan yang diusulkan harus memiliki luas minimal sekitar enam hektare, berada pada kondisi topografi yang relatif datar, serta dekat dengan berbagai fasilitas publik seperti jaringan listrik, sumber air bersih, layanan kesehatan, akses pasar, dan layanan pemadam kebakaran. Selain itu, lokasi sekolah tidak boleh berada di kawasan yang berisiko bencana, kawasan industri, maupun area yang berpotensi mengganggu fungsi lahan produktif. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lahan yang diusulkan telah memenuhi standar dan dapat ditetapkan sebagai aset yang digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Komitmen pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana juga tercermin dari peningkatan alokasi anggaran Program Sekolah Rakyat. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,9 triliun untuk Program Sekolah Rakyat, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran tersebut difokuskan untuk pembangunan sekitar 200 lokasi baru guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu (Indonesia Baik, 2025). Peningkatan anggaran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memastikan ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai sebagai dasar pelaksanaan program.

Pembiayaan, dana pendidikan merupakan sumber daya strategis yang menentukan keberlangsungan penyelenggaraan program. Karena sumber daya keuangan bersifat terbatas, pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan akuntabel agar tujuan pendidikan dapat tercapai sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan (Kamaludin, 2023). Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran pemerintah daerah masih menjadi salah satu tantangan dalam mendukung penyediaan lahan dan pembangunan fasilitas pendidikan. Meskipun Program Sekolah Rakyat telah memperoleh dukungan dari pemerintah pusat melalui skema Proyek Strategis Nasional (PSN), kemampuan fiskal masing-masing daerah yang berbeda dapat memengaruhi kesiapan implementasi program di lapangan.

Selain aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana, waktu pelaksanaan juga menjadi faktor yang menentukan efektivitas implementasi Program Sekolah Rakyat. Proses pembangunan infrastruktur, penyiapan lahan, rekrutmen tenaga pendidik, penyusunan kurikulum, hingga penerimaan peserta didik memerlukan perencanaan yang matang agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai target. Melalui pelaksanaannya, pemerintah daerah juga melakukan pendampingan penjangkauan calon peserta bersama Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendamping keluarga untuk memastikan kelompok sasaran dapat mengakses program secara optimal.

Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan yang berpotensi memengaruhi keberhasilan implementasi Program Sekolah Rakyat. Ketersediaan lahan yang memenuhi seluruh persyaratan teknis menjadi tantangan terbesar dalam tahap persiapan program. Selain itu, masih ditemukan resistensi dari sebagian keluarga dan calon peserta didik yang enggan mengikuti program karena telah terbiasa bekerja di jalan, membantu perekonomian keluarga, atau kurang tertarik dengan sistem pendidikan berasrama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada kesiapan sumber daya fisik dan finansial, tetapi juga pada kesiapan sosial masyarakat sebagai kelompok sasaran program. kesiapan sumber daya dalam Program Sekolah Rakyat menunjukkan adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat miskin.

Disposisi Pelaksana dalam Menentukan Efektivitas Implementasi Program

Pada model implementasi kebijakan Edward III, disposisi juga merujuk pada sikap, komitmen, dan kesediaan para pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan. berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial Provinsi Banten, ditemukan bahwa aspek disposisi dalam implementasi Program Sekolah Rakyat menunjukkan kecenderungan yang positif. Hal ini terlihat dari adanya komitmen yang cukup kuat dari para pelaksana untuk mendukung keberhasilan program yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sebagai program prioritas pemerintah pusat, Sekolah Rakyat tidak hanya dipandang sebagai upaya perluasan akses pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan

melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemahaman tersebut mendorong para pelaksana di tingkat daerah untuk terlibat aktif dalam berbagai tahapan implementasi program.

Komitmen tersebut tercermin dari keterlibatan pemerintah daerah dalam proses penjangkauan calon peserta, penyiapan lahan, penetapan peserta didik, hingga penyediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam operasional sekolah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menjalankan peran administratif, tetapi juga berupaya memastikan bahwa program benar-benar menjangkau kelompok sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari mekanisme home visit yang dilakukan oleh pendamping sosial untuk memverifikasi kondisi keluarga calon peserta secara langsung. Langkah tersebut menunjukkan adanya keseriusan pelaksana dalam memastikan bahwa penerima manfaat merupakan keluarga yang memang berada dalam kelompok desil 1 dan desil 2 sesuai dengan tujuan program.

Selain menunjukkan komitmen yang tinggi, para pelaksana juga memperlihatkan tingkat penerimaan yang baik terhadap Program Sekolah Rakyat. Program ini dipandang sebagai solusi atas berbagai persoalan pendidikan yang masih dihadapi oleh masyarakat miskin, khususnya tingginya angka anak tidak sekolah dan putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Penerimaan yang positif tersebut terlihat dari kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program meskipun masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Di sisi lain, masyarakat sasaran pada umumnya juga memberikan respons yang baik karena Sekolah Rakyat menawarkan pendidikan yang tidak hanya gratis, tetapi juga menyediakan kebutuhan hidup peserta didik secara menyeluruh melalui sistem boarding school. Dengan ditanggungnya kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, perlengkapan sekolah, hingga layanan kesehatan, keluarga tidak lagi dibebani biaya pendidikan yang selama ini menjadi salah satu faktor utama penghambat akses pendidikan.

walaupun demikian, hasil wawancara mendalam juga menunjukan bahwa penerimaan program belum sepenuhnya berjaalan tanpa hambatan yang data. masih terdapat sebagian kecil keluarga yang menolak atau merasa ragu untuk mengikutsertakan anaknya dalam program. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi, seperti ketergantungan keluarga terhadap penghasilan anak, kebiasaan hidup yang telah terbentuk, maupun ketidaksiapan anak untuk tinggal di lingkungan asrama. Namun, jumlah peserta yang memilih keluar dari program relatif kecil sehingga tidak mengurangi gambaran umum bahwa tingkat penerimaan terhadap Program Sekolah Rakyat cenderung tinggi.

Aspek disposisi tercermin dari integritas dan motivasi para pelaksana dalam menjalankan program. Integritas terlihat dari upaya menjaga ketepatan sasaran melalui proses verifikasi lapangan dan pendampingan yang dilakukan secara langsung kepada keluarga calon peserta. Proses ini menunjukkan bahwa pelaksana tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kuantitatif, tetapi juga berupaya memastikan bahwa bantuan pendidikan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Sementara itu, motivasi pelaksana dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan untuk mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Program Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan layanan pendidikan formal, tetapi juga dilengkapi dengan program matrikulasi, pemetaan bakat melalui DNA Talent, serta layanan kesehatan yang terintegrasi. Berbagai fasilitas tersebut menunjukkan adanya semangat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mampu mendukung perkembangan akademik maupun non-akademik peserta didik.

Motivasi dan profesionalisme pelaksana juga diperkuat melalui adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Evaluasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti Kementerian Sosial, BPKP, dan inspektorat, menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui

evaluasi tersebut, berbagai kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti, termasuk kemungkinan penyesuaian personel apabila diperlukan. Dengan demikian, integritas dan motivasi pelaksana tidak hanya bergantung pada komitmen individu, tetapi juga didukung oleh sistem pengawasan yang mendorong akuntabilitas dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Temuan wawancara yang didapat membantu untuk memahami bahwa indikator disposisi dalam implementasi Program Sekolah Rakyat di Provinsi Banten menunjukkan kondisi yang relatif baik. Komitmen pelaksana yang tinggi, tingkat penerimaan program yang positif, serta integritas dan motivasi yang tercermin dalam berbagai upaya penjangkauan, pendampingan, dan evaluasi menjadi faktor penting yang mendukung pelaksanaan program. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan lahan dan resistensi dari sebagian kecil masyarakat sasaran, secara keseluruhan sikap para pelaksana menunjukkan dukungan yang kuat terhadap keberhasilan Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.

Struktur Birokrasi dan Koordinasi Antar Lembaga dalam Pelaksanaan Program

Dalam perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III, struktur birokrasi merupakan faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan melalui kejelasan pembagian tugas, prosedur operasional, mekanisme koordinasi, serta hubungan antar lembaga yang terlibat (Edwards III, 1980). Struktur birokrasi yang jelas memungkinkan setiap aktor memahami peran dan tanggung jawabnya sehingga kebijakan dapat diimplementasikan secara terarah dan konsisten. Pada Program Sekolah Rakyat, struktur birokrasi menjadi aspek yang sangat penting karena pelaksanaan program melibatkan berbagai institusi lintas sektor yang memiliki kewenangan dan fungsi yang berbeda.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi Program Sekolah Rakyat di Provinsi Banten dilaksanakan melalui pola koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial Republik Indonesia, berperan sebagai leading sector yang bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, penetapan standar program, penganggaran, serta pengawasan pelaksanaan secara nasional. Di tingkat daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab dalam mendukung kesiapan implementasi melalui penyediaan lahan, fasilitasi pembangunan sarana pendidikan, penetapan peserta didik, serta penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Struktur birokrasi Program Sekolah Rakyat juga menunjukkan adanya koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Selain Kementerian Sosial, program ini turut melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam penyusunan kurikulum dan pengelolaan proses pembelajaran, Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan infrastruktur sekolah, Badan Pusat Statistik dalam penyediaan data sosial ekonomi masyarakat, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berperan dalam pengawasan dan evaluasi program. Keterlibatan berbagai institusi tersebut menunjukkan bahwa Program Sekolah Rakyat tidak hanya diposisikan sebagai program pendidikan semata, tetapi juga sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi antar lembaga dilakukan melalui mekanisme komunikasi vertikal dan horizontal. Koordinasi vertikal berlangsung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui rapat koordinasi, petunjuk teknis pelaksanaan, dan monitoring berkala. Sementara itu, koordinasi horizontal dilakukan antar perangkat daerah dan instansi pelaksana yang terlibat dalam proses identifikasi peserta, penyediaan sarana dan prasarana, serta

pendampingan sosial bagi keluarga penerima manfaat. Melalui koordinasi tersebut, setiap tahapan implementasi dapat berjalan secara terintegrasi sehingga mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan maupun duplikasi program.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas struktur birokrasi juga berpotensi menimbulkan tantangan dalam implementasi program. Banyaknya aktor yang terlibat menyebabkan proses koordinasi membutuhkan waktu yang relatif panjang, terutama dalam penentuan lahan, sinkronisasi data penerima manfaat, dan penyesuaian kebutuhan sumber daya manusia. Perbedaan kapasitas kelembagaan antar daerah juga memengaruhi kecepatan respons dalam memenuhi berbagai persyaratan teknis yang ditetapkan pemerintah pusat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi Program Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan birokrasi dalam membangun koordinasi yang efektif dan responsif.

Selain itu, keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program. SOP digunakan sebagai pedoman dalam proses pendataan peserta didik, verifikasi keluarga penerima manfaat, penyiapan tenaga pendidik, hingga mekanisme monitoring dan evaluasi program. Dengan adanya SOP yang jelas, pelaksana program memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat meminimalkan perbedaan interpretasi kebijakan di lapangan. Kejelasan prosedur tersebut juga mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.

Berdasarkan temuan penelitian, struktur birokrasi dalam implementasi Program Sekolah Rakyat di Provinsi Banten secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik. Pembagian kewenangan antar lembaga relatif jelas dan didukung oleh mekanisme koordinasi yang terstruktur. Namun demikian, tantangan koordinasi lintas sektor dan kompleksitas hubungan antar lembaga masih memerlukan penguatan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, peningkatan integrasi kelembagaan, penyederhanaan mekanisme koordinasi, serta penguatan kapasitas birokrasi daerah menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan Program Sekolah Rakyat dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

KESIMPULAN

Implementasi Program Sekolah Rakyat di Provinsi Banten menunjukkan bahwa program ini memiliki peran strategis dalam mendukung pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem serta menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III, keberhasilan pelaksanaan program didukung oleh komunikasi yang relatif efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sasaran, ketersediaan sumber daya yang terus diperkuat melalui dukungan anggaran, sarana prasarana, serta tenaga pendidik, disposisi pelaksana yang menunjukkan komitmen dan penerimaan positif terhadap program, serta struktur birokrasi yang melibatkan koordinasi lintas sektor secara terintegrasi. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan ketersediaan lahan, perbedaan kapasitas daerah, kompleksitas koordinasi antar lembaga, dan resistensi sebagian kecil masyarakat sasaran terhadap sistem pendidikan berasrama. Oleh karena itu, penguatan koordinasi kelembagaan, optimalisasi sumber daya, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar Program Sekolah Rakyat dapat berjalan

lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung tujuan pembangunan pendidikan yang inklusif di Provinsi Banten.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, Y. (2026). Koordinasi Antar Lembaga dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kualitatif Tata Kelola Kolaboratif. *Journal of Law, Policy, and Governance*, 1(1), 14–19.
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan. Pustaka Pelajar.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Fajri, A. K. (2022). Analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan. *Gema Publica*, 7(1), 158–170.
- Fitriyani, H., Umayyah, S., Fatin, N. F., & Fatayan, A. (2025). Pengaruh Stratifikasi Sosial Terhadap Akses Pendidikan Dasar di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan. *Journal Sains Student Research*, 3(4), 34–44.
- Hariyanto, T., Tamlekha, T., Fahmi, D. R., Assalaam, S. H. I., & Hidayat, A. (2026). Analisis Kebijakan Pendidikan Sosial Kementerian Sosial di Kabupaten Sukabumi Studi Kasus Sekolah Rakyat Phala Martha. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 9(2), 1680–1689.
- Ibnu, K. I. M., & Kurniawan, T. (2025). Implementasi Kebijakan Program Sekolah Rakyat Kementerian Sosial RI (Studi Kasus: Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan). *Jurnal Sosio Konsepsia*, 15(1).
- Inayah, R. (2023). Strategi komunikasi penyuluhan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial pada masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 10(2), 134–149.
- Juhaeriah, J. (2025). SEKOLAH RAKYAT PROGRAM AFIRMASI SEKOLAH BERMUTU DAN PENGENTASAN KEMISKINAN. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Keislaman*, 5(3), 637–651.
- Kamaludin, K. (2023). Optimalisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 1(1), 6-13.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). *Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). *Sekolah Rakyat sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan melalui Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Mulyadi, D. (2022). Koordinasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 115–127.
- Mulyasa, H. E. (2021). *Menjadi guru penggerak merdeka belajar*. Bumi Aksara.
- Nelliraharti, N., & Jarmita, N. (2025). Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. *Journal of Education Science*, 11(1), 35–43.
- Ni'mah, R., Yusuf, Z., Elviyati, E., Husna, D. H., Pamungkas, H. G., Hadi, G. A., & Nasor, M. (2025). IDENTIFIKASI DAN MASALAH PERUMUSAN KEBIJAKAN. *UNISAN JURNAL*, 4(8), 95–107.
- Purnomo, A. (2018). Pelaksanaan kebijakan komunikasi organisasi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 11–26.
- Rajagukguk, S. R., Tumanggor, S., Malau, J. G., & Turnip, H. (2023). Pentingnya Pemerhatian Sarana Dan Prasaran Bagi Pendidikan Disekolah Yang Terpencil. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 204-2015.
- Samhaji, S., & Anggara, F. D. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Pemerataan Akses Pendidikan pada Daerah Tertinggal Indonesia. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 5(2), 99–112.
- Saputri, I., & Fatmawati, F. (2024). Permasalahan Pengelolaan Sarana dan Prasarana dalam Pendidikan. *Innovations in Multidisciplinary Education Journal*, 1(1), 29–33.

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAKYAT DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN**

- Sari, M. A. P., Permadi, R. N., Sandiza, T. M. H., & Sartika, D. (2025a). Sekolah Rakyat: Menjawab Tantangan, Mewujudkan Harapan. *Suara Analis Kebijakan*, 3(3).
- Siswana, W. S. P. (2026). *PENGUATAN KEBIJAKAN SOSIAL SEKOLAH RAKYAT SEBAGAI STRATEGI INKLUSIVITAS PENDIDIKAN: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS*.
- Suharti, J., & Haifaturrahmah, H. (2025). Pentingnya Pendidikan Sebagai Fondasi Pembangunan Bangsa. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran* | E-ISSN: 3026-6629, 3(2), 593–596.
- Sulfiani, B., Armita, A. T. R., Soraya, A., Edi, M., & Aksa, B. D. (2025a). DAMPAK KUALITAS PENDIDIKAN TERHADAP PENGEMBANGAN KETERAMPILAN SUMBER DAYA MANUSIA. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(3), 350–361.
- Suryana, S. (2020). Permasalahan mutu pendidikan dalam perspektif pembangunan pendidikan. *Edukasi*, 14(1).
- Widjaja, G., & Dhanudibroto, H. (2025). Koordinasi antar-lembaga pemerintah dan efektivitas kebijakan kesejahteraan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(7), 1323–1332.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Malang: Media Nusa Creative.